

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM BINA KELUARGA LANJUT USIA OLEH TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI DESA CIKUKULU TASIKMALAYA

Adypia Nunung¹, Aditiyawarman², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : Adypianunung11@gmail.com

ABSTRACT

The results of the author's observations indicate that the implementation of the Policy on the Elderly Family Development Program by Family Planning Extension Workers in Cikukulu Village, Karangnunggal District, Tasikmalaya Regency is still not optimal. The purpose of this study was to determine the Implementation of Policies on the Elderly Family Development Program by Family Planning Extension Workers. The method used in this research is descriptive analysis. Informants as many as 10 people. Data collection techniques are library research, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through data processing from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer problems in research. Based on the results of the study that: 1) Policy Implementation regarding the Elderly Family Development Program has not been carried out in accordance with several stages that must be carried out, which include the lack of availability of resources, both budgets, implementing resources and facilities and infrastructure. Likewise with the results of observations made it is known that Policy Implementation is not supported by an adequate budget, besides that officers have difficulty because not all facilities and infrastructure can be equipped. 2) There are obstacles, including the lack of availability of resources, both budgets, implementing resources and supporting facilities and infrastructure, besides that program socialization to the community is still lacking. Likewise, the observation results show that budget support is still lacking, besides that the existing facilities and infrastructure are inadequate to be able to implement the program as expected. 3) There are efforts to overcome obstacles, including providing resources, both budgets, implementing resources and supporting facilities and infrastructure besides conducting outreach to elderly families. Likewise, from the results of observations, it is known that there are efforts, including involving cadres in village deliberation activities, completing facilities and infrastructure in stages so that the program can be implemented according to expectation.

Keywords : Policy implementation, Elderly Family Development Program, Family Planning Extension Workers

ABSTRAK

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia belum dilaksanakan sesuai dengan beberapa tahap yang harus dilaksanakan yang antara lain kurangnya ketersediaan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Kebijakan kurang didukung dengan anggaran yang memadai, selain itu petugas kesulitan karena tidak semua sarana dan prasarana dapat dilengkapi. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain kurangnya ketersediaan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana yang mendukung, selain itu sosialisasi program kepada masyarakat masih kurang dilakukan. Begitupula dengan hasil observasi diketahui dukungan anggaran yang masih kurang, selain itu sarana dan prasarana yang ada kurang memadai untuk dapat mengimplementasikan program sesuai dengan harapan. 3) Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan antara lain menyediakan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana yang mendukung selain itu melakukan sosialisasi kepada keluarga lansia. Begitupula dengan hasil observasi diketahui adanya upaya yang antara lain dengan melibatkan kader dalam kegiatan musyawarah desa, melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap sehingga program dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, Program Bina Keluarga Lanjut Usia, Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disebutkan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Salah satu kunci keberhasilan program KB yakni keterlibatan semua pihak baik dari institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat serta keterlibatan seluruh anggota keluarga itu sendiri. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan tombak pengelola KB di lapangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Permasalahan sangat kompleks dan berkaitan satu sama lain sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi tidak seimbang, permasalahan tersebut terurai seperti disuatu daerah dan kota-kota besar, umumnya masih sangat banyak masyarakat yang kurang memahami penting program keluarga berencana.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini menetapkan bahwa jenis pelayanan KB yang dijamin dalam JKN adalah

konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi KB. mengenai pembiayaannya diatur dalam Permenkes Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Pelayanan yang dimaksud diselenggarakan bekerja sama dengan lembaga yang membidangi KB, dalam hal ini BKKBN. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor : 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan program KB dinyatakan bahwa Penyelenggaraan program KB diarahkan pada terwujudnya penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang tumbuh seimbang dan peningkatan kualitas penduduk pada seluruh dimensi kehidupan.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan program keluarga berencana dan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dengan tugas utama petugas lapangan keluarga berencana adalah melakukan urusan kegiatan-kegiatan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program keluarga berencana di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh petugas lapangan keluarga berencana. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah konsolidasi dengan semua pihak terkait dalam mengemban tugasnya, kemampuan para petugas

dalam merencanakan, menganalisis, mengevaluasi pelaksanaan program keluarga berencana di wilayah kerjanya, upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, kendala dalam melibatkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagai petugas yang mempunyai kedudukan di tingkat desa/kelurahan, adalah merupakan petugas strategis yang diharapkan mampu menjawab dan membawa perubahan pada masyarakat. Melalui petugas lapangan keluarga berencana, semua gagasan baru keluarga berencana bisa disampaikan kepada masyarakat, dan semua potensi masyarakat bisa digali, dan melalui petugas lapangan keluarga berencana pula, pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana bisa berjalan dengan maksimal dan ditingkatkan termasuk terlaksananya program Bina Keluarga Lansia (BKL).

Berdasarkan pada Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan telah ditetapkan 81 urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan sekaligus menjadi kewenangannya, termasuk didalamnya mengenai urusan Bina Keluarga Lansia.

Selanjutnya pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program KB dinyatakan bahwa program bina keluarga lanjut usia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

Program Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan suatu wadah yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki lansia untuk mengetahui, memahami, dan mampu membina kondisi dan masalah yang dihadapi lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang sehat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi orang keluarga masyarakat.

Program bina keluarga lansia di Desa Cikukulu belum dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan dari 46 orang lansia baru 9 orang lansia yang aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sedangkan yang lainnya kurang memiliki kesadaran dalam

mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga penyuluh.

Begitupula dengan hasil observasi awal diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana kurang mengadakan pertemuan setiap bulannya secara rutin untuk mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan bagi para lansia. Contohnya : Masih adanya lansia yang kurang memperhatikan kesehatannya karena kurang memiliki pemahaman mengenai pentingnya memeriksakan kesehatannya.
2. Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana belum optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga program bina keluarga lansia belum berjalan dengan maksimal. Contohnya : Masih adanya keluarga yang memiliki lansia tidak memahami penanganan lansia sehingga lansia dianggap beban bagi keluarganya dan menyebabkan lansia kurang mendapatkan perawatan.
3. Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana kurang memberdayakan keluarga lansia dalam memperoleh penghasilan, hal ini dikarenakan

lansia tidak memiliki kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan oleh lansia. Contohnya : Banyaknya lansia yang hanya mengandalkan bantuan dari keluarga bahkan tetangganya karena memang tidak memiliki kemampuan dalam berusaha.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya”**.

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi

dalam Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya?

KAJIAN PUSTAKA

Program KB merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga terdapat keterkaitan antara program Keluarga Berencana dengan bidang kajian ilmu pemerintahan karena melalui program Keluarga Berencana dapat diketahui sejauhmana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terkait program keluarga berencana.

Menurut Surbakti (2013:254), dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kegiatan. Pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijaksanaan. Kedua, melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Ketiga, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan

pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran. Keempat pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya. Kelima, memberikan manfaat kepada dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

BKKBN (2012: 10) menyatakan bahwa :

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalampengasuhan, perawatan, pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian program bina keluarga lansia adalah usaha untuk menjadikan keluarga sebagai pembina lansia dalam rumah tangganya merupakan suatu nuansa yang baru. Seluruh keluarga harus bisa memberikan suasana yang tenteram tetapi dinamis agar lansia yang tinggal dalam rumah bisa menikmati sisa hidupnya secara produktif dan bahagia dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang

memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan, pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lamanya penelitian selama 12 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas lapangan KB belum optimal dalam melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sehingga menyebabkan permasalahan yang ada belum dapat ditindaklanjuti secara cepat selain itu permasalahan yang ada belum dilakukan perbaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program bina keluarga

lansia sehingga laporan pelaksanaan program bina keluarga lansia belum dilakukan secara rutin.

Menurut Mustopadidjaja (2012 : 45) menguraikan bahwa :

Evaluasi implementasi kebijakan yang dilakukan dengan tujuan pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki mengenai sistem dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa petugas lapangan KB belum optimal dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program BKL hal ini dikarenakan masih kurangnya dilakukan evaluasi kinerja pelaksana program bina keluarga lansia dan kurangnya dilakukan laporan pelaksanaan program bina keluarga lansia sehingga permasalahan yang terjadi belum dapat diselesaikan secara cepat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan sesuai dengan pendapat Surbakti (2013:254) mengenai beberapa tahap

yang harus dilaksanakan dalam implementasi kebijakan. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi program antara lain kurangnya ketersediaan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana yang mendukung implementasi program selain itu sosialisasi program kepada masyarakat juga masih kurang dilakukan sehingga keluarga lansia kurang berperan aktif dalam mengikuti program BKL.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya belum terlaksana dengan baik karena kurang didukung dengan anggaran yang memadai sehingga menyebabkan keluarga lansia harus iuran apabila ingin mengikuti program BKL selain itu petugas kesulitan karena tidak semua sarana dan prasarana dapat dilengkapi untuk dapat mengimplementasikan program sesuai dengan harapan. Permasalahan lainnya karena dukungan dari pemerintah daerah masih kurang terhadap petugas PLKB sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tiap desa.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh

Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya ketersediaan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana yang mendukung implementasi program selain itu sosialisasi program kepada masyarakat juga masih kurang dilakukan sehingga keluarga lansia kurang berperan aktif dalam mengikuti program BKL. Hambatan lainnya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari keluarga lansia dalam membantu kelancaran program BKL serta lansia kurang berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang direncanakan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang antara lain terlihat dari dukungan anggaran yang masih kurang sehingga peserta BKL harus membayar iuran apabila ingin

mengikuti kegiatan karena anggaran dari pemerintah daerah maupun desa masih kurang memadai, selain itu sarana dan prasarana yang ada kurang memadai untuk dapat mengimplementasikan program sesuai dengan harapan. Permasalahan lainnya karena dukungan dari pemerintah daerah masih kurang terhadap petugas PLKB sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tiap desa.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain Menyediakan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana yang mendukung implementasi program selain itu melakukan sosialisasi

program kepada keluarga lansia sehingga keluarga lansia kurang berperan aktif dalam mengikuti program BKL. Meminta dukungan dari keluarga lansia dalam membantu kelancaran program BKL sehingga lansia dapat berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang direncanakan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang antara lain terlihat dari adanya keterlibatan kader dalam kegiatan musyawarah desa sehingga dapat mengajukan anggaran dalam musyawarah desa melalui anggaran dana desa maupun ADD, melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap sehingga program dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga

Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan sesuai dengan pendapat Surbakti (2013:254) mengenai beberapa tahap yang harus dilaksanakan dalam implementasi kebijakan. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi program antara lain kurangnya ketersediaan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana uang mendukung implementasi program selain itu sosialisasi program kepada masyarakat juga masih kurang dilakukan sehingga keluarga lansia kurang berperan aktif dalam mengikuti program BKL. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya belum terlaksana dengan baik karena kurang didukung dengan anggaran yang memadai sehingga menyebabkan keluarga lansia harus iuran apabila ingin mengikuti program BKL selain itu petugas kesulitan karena tidak semua sarana dan prasarana dapat dilengkapi untuk dapat mengimplementasikan program sesuai dengan harapan. Permasalahan lainnya karena

dukungan dari pemerintah daerah masih kurang terhadap petugas PLKB sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tiap desa.

2. Adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya ketersediaan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana uang mendukung implementasi program selain itu sosialisasi program kepada masyarakat juga masih kurang dilakukan sehingga keluarga lansia kurang berperan aktif dalam mengikuti program BKL. Hambatan lainnya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari keluarga lansia dalam membantu kelancaran program BKL serta lansia kurang berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang direncanakan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang

antara lain terlihat dari dukungan anggaran yang masih kurang sehingga peserta BKL harus membayar iuran apabila ingin mengikuti kegiatan karena anggaran dari pemerintah daerah maupun desa masih kurang memadai, selain itu sarana dan prasarana yang ada kurang memadai untuk dapat mengimplementasikan program sesuai dengan harapan. Permasalahan lainnya karena dukungan dari pemerintah daerah masih kurang terhadap petugas PLKB sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tiap desa.

3. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain Menyediakan sumber daya baik anggaran, sumber daya pelaksana maupun sarana dan prasarana yang mendukung implementasi program selain itu melakukan sosialisasi program kepada keluarga lansia sehingga keluarga lansia kurang berperan aktif dalam mengikuti program BKL. Meminta dukungan dari

keluarga lansia dalam membantu kelancaran program BKL sehingga lansia dapat berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang direncanakan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang antara lain terlihat dari adanya keterlibatan kader dalam kegiatan musyawarah desa sehingga dapat mengajukan anggaran dalam musyawarah desa melalui anggaran dana desa maupun ADD, melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap sehingga program dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan KB sebaiknya dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga Lansia dapat meningkatkan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang selama ini belum memadai selain itu sebaiknya petugas lapangan KB meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah desa maupun

- Badan KBPM dalam rangka meningkatkan dukungan dalam memperlancar pelaksanaan program BKL.
2. Pemerintah desa sebaiknya memberikan anggaran yang memadai mengingat program BKL merupakan program pemberdayaan masyarakat yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah desa sehingga program-program BKL dapat dilaksanakan secara optimal.
 3. Keluarga Lansia sebaiknya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program BKL baik anggaran maupun keterlibatannya dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga dapat membantu melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan program BKL.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan n Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abrar, M., I. Bachtiar dan A. Budiyanto. 2012. *Struktur Komunitas dan Penyakit Pada Karang (Scleractinia) di Perairan Lembata*. Nusa Tenggara Timur. Ilmu Kelautan. Vol 17(2)
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- _____. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- BKKBN. 2005. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: BKKBN.
- _____. 2012 *Pedoman tata cara kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana [PLKB]*. Jakarta : BKKBN
- _____. 2012. *Buku Pedoman PLKB dalam menghadapi perubahan*. Sumatra Barat : BKKBN.
- _____. 2012. *Modul Bina Keluarga Lansia*. Medan : BKKBN.
- Elfi, M. (2012). *Evaluasi Keaktifan Lansia Dalam Mengikuti Posyandu Lansia Terhadap Tingkat Kemandirian Lansia Di Posyandu Adji Yuswo Ngebel Tamantirta Kasihan Bantul*. Publikasi Penelitian. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Keperawatan. Fakultas

- Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamilah. 2016. *Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia Di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2013. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ramadhani Bondan Puspitasari, 2016. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo*. (Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
- Rangkuti, K. 2007. *Implementasi Program Keluarga Berencana Nasional Era Desentralisasi*. Medan: Universitas Medan Area
- Sciortino, R. 2007. *Menuju Kesehatan Madani*. Jogjakarta : Gadjah Mada University Pres
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Surakhmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widya Sarana.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Tarigan, Antonius. 2010. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi)*, Malang : Bayu Media Publishing
- _____. 2014. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media
- Zam-zam, Mukhtaruddin. 2002. *Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)*

- Hubungannya Dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kota Tebing Tinggi Tahun 2002.* Tesis. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera